

**PENGUATAN KITAB KUNING DAN TAHFIZ AL-QUR'AN SEBAGAI
BASIS PENDIDIKAN DI MADRASAH SERTA LP MA'ARIF NU
DALAM LANSKAP *FIKRAH NAHDLIYAH***

*REINFORCEMENT OF THE YELLOW BOOK (KITAB KUNING) AND TAHFIZ
AL-QUR'AN AS THE BASE OF EDUCATION IN MADRASAH AND THE LP
MA'ARIF NU IN THE LANDSCAPE OF NAHDLIYAH'S FIKRAH*

Muhammad Khoirul Anwar

Program Doktor UNUSIA Jakarta

Alamat: Jl. Pinang No. 13, Rt 01/03, Pamulang Timur, Tangerang Selatan

khoirulanwarafa306@gmail.com

ABSTRACT

The existence of Madrasah and LP Ma'arif NU inspired the birth of other Islamic educational institutions such as the Integrated Islamic School (SIT), but these educational institutions did not apply good religious understanding. The curriculum applied at the SIT institute even though it adopts the Madrasah and LP Ma'arif NU system even though with various filters. As teaching materials that are characteristic in Madrasah and LP Ma'arif NU are imitated but are taken in parts of the chapter that are in accordance with the orientation of the relevant institutions. Along with the strengthening of the SIT institutions in the community, precisely among Madrasah and LP Ma'arif NU experienced the decline of the Yellow Book and Tahfiz Al-Qur'an which has always been a trend of education in Madrasah and the LP Ma'arif NU. The decline in quality is partly due to the hybridization of the state curriculum with the pesantren curriculum. But it tends to prioritize the target country with the pretext of equalizing a diploma. Yet if these two things (Mastery of the Yellow Book and Tahfiz Al-Qur'an) are still well guarded and based on the strengthening of *Nahdliyah's Fikrah* (Fikrah Nahdliyah) which includes manhaj and its characteristics, then generations will emerge that play an active role in improving the people (*islah al-ummah*) in addition to creating social tranquility (*al-Sakinah al-Ijtima'iyah*).

Keywords: *Islamic Education, LP Ma'arif NU, The Yellow Book, Tahfiz Al-Qur'an.*

ABSTRAK

Eksistensi Madrasah dan LP Ma'arif NU menginspirasi lahirnya lembaga-lembaga pendidikan Islam lain semisal Sekolah Islam Terpadu (SIT), namun lembaga pendidikan tersebut tidak menerapkan faham keagamaan yang baik. Kurikulum yang diterapkan di lembaga SIT padahal mengadopsi sistem Madrasah dan LP Ma'arif NU meskipun dengan beragam filter. Seperti bahan ajar yang menjadi ciri khas di Madrasah dan LP Ma'arif NU ditiru tetapi diambil pada bagian-bagian bab yang sesuai dengan orientasi lembaga terkait. Seiring dengan menguatnya lembaga SIT di masyarakat, justru di kalangan Madrasah dan LP Ma'arif NU mengalami peluruhan Kitab Kuning dan Tahfiz Al-Qur'an yang dari dulu sudah menjadi tren pendidikan di Madrasah serta LP Ma'arif NU. Penurunan kualitas tersebut diantaranya disebabkan adanya hibridasi kurikulum negara dengan kurikulum pesantren. Namun cenderung memprioritaskan pada target negara dengan dalih penyetaraan ijazah. Padahal jika dua hal (Penguasaan Kitab Kuning dan Tahfiz Al-Qur'an) tersebut tetap dijaga dengan baik serta dilandasi dengan penguatan *Fikrah Nahdliyah* yang meliputi manhaj dan ciri-cirinya, maka akan muncul generasi-generasi yang berperan aktif dalam rangka perbaikan umat (*islah al-ummah*) di samping menciptakan ketenangan sosial (*al-Sakinah al-Ijtima'iyah*).

Kata kunci: *Madrasah, LP Ma'arif NU, Kitab Kuning, Tahfiz Al-Qur'an.*

A.PENDAHULUAN

Madrasah dan LP Ma'arif NU yang di dalamnya juga terdapat pesantren telah lama menjadi tren lembaga pendidikan kebanggaan negara Indonesia. Bahkan dalam catatan sejarah hanya tiga model lembaga pendidikan yang dikenal di Indonesia, yakni pesantren, madrasah, dan sekolah umum. Adapun sekolahan umum merupakan lembaga pendidikan di Indonesia warisan Belanda, yang mengajarkan beragam ilmu-ilmu umum. Seperti ilmu alam, ilmu sosial, ilmu eksak, dan ilmu humaniora. Sedangkan pesantren merupakan lembaga pendidikan yang di dalamnya terdapat masjid dan kiai serta mengajarkan ilmu agama Islam.

Dalam pandangan sejarah, kehadiran pesantren semula dijadikan sebagai tempat islamisasi secara massal, (Irawan, 2018:14). Di dalamnya juga murni mengajarkan Kitab Kuning dan bertujuan utama untuk menghasilkan para ahli agama, (Steenbrink, 1986: 167). Namun perpaduan budaya yang diterapkan oleh lembaga pesantren sangat unik. Di satu sisi, pesantren tidak hanya mempelajari sinkretis (baca: mistis) dan selalu memperbarui diri dengan merujuk pada sumber kitab-kitab klasik karangan ulama Timur Tengah, (Bruinessen, 2015: 90).

Adapun Madrasah selama ini merupakan kelanjutan dari misi pesantren dengan menjembatani antara pendidikan agama murni dan pendidikan umum. Sehingga 30% pelajaran yang diterapkan di Madrasah adalah murni dari materi pesantren dan sisanya mengadopsi pelajaran yang digunakan oleh sekolah umum. Dengan dalih agar ada dualisme pendidikan umum dan pesantren yang dihasilkan dari lembaga Madrasah. Pada awal abad 20, lembaga ini berdiri di Indonesia untuk menjawab tantangan politik etis dari pemerintah Belanda sehingga menuntut masyarakat untuk faham di bidang agama dan umum. Namun, pada praktiknya tetap didominasi serta memprioritaskan pendidikan agama, (Mahfudz, 1999:175).

Fenomena tersebut sangat menarik didiskusikan. Terlebih ketika ada banyak wacana yang mengkhawatirkan lulusan Madrasah akan menghadapi ketertinggalan, tidak mengikuti perkembangan zaman dalam bidang sains. Dampaknya, Madrasah dan Pesantren harus memenuhi preferensi tuntutan pasar dan tidak lagi hanya mementingkan kecerdasan *khuluqiyah*, tetapi harus mengimbangi dengan kecanggihan teknologi dan sains, (Hadi, 2017:135). Anehnya lagi, kasus seperti ini justru merambah ke daerah pedesaan akibat terkontaminasi dengan orientasi urban atau masuknya kemoderen di wilayah terkait. Selanjutnya mengakibatkan secara masif Pesantren dan Madrasah melakukan transformasi pendidikan vokasi, seperti berdirinya SMK. Dengan tujuan dapat melahirkan lulusan yang siap kerja dan faham agama. Namun yang terjadi justru tidak matangnya keilmuan agama sehingga lebih fokus pada ilmu vokasi. Sementara muncul lembaga-lembaga Pendidikan yang sejenis semisal Sekolah Islam Terpadu (SIT) dengan gaya Madrasah dan Pesantren yang ditopang dengan market yang bagus berhasil merambah masyarakat menengah ke atas. Lalu kemana arah Madrasah dan LP Ma'arif NU seharusnya?

B.HASIL DAN BAHASAN

Kitab Kuning dan Tahfiz Al-Qur'an Sebagai Tren Kurikulum Sekolah Islam Abad 21

Kitab kuning Seperti yang dituliskan oleh Ali Yafie dan yang dikutip oleh Ghazali Munir bahwa Kitab Kuning bukanlah terbatas pada kitab-kitab agama (tauhid, fiqh, tasawuf) yang berbahasa Arab dan ditulis oleh orang Arab. Tetapi juga termasuk karya tulis ulama Nusantara baik yang berbahasa Arab maupun yang berbahasa Jawa. Adapun Pesantren merupakan lembaga yang melakukan kajian dan pengembangan terhadap Kitab Kuning. Sebab pesantren tidak mengenal adanya buku-buku selain Kitab Kuning. Sedang kitab yang dipergunakan dalam dunia Pesantren adalah buku-buku yang ditulis, dicetak menggunakan huruf Arab baik dalam bahasa Arab, Melayu, Jawa, Sunda maupun lainnya, (Munir, 2008:91). Tradisi mempelajari Kitab Kuning tersebut jelas bukan asli dari Indonesia. Sebab kitab-kitab

yang dipelajari di Pesantren Indonesia sudah ditulis lama sebelum Islam tersebar di Indonesia, (Bruinessen, 2015: 90).

Meskipun demikian, hadirnya kitab-kitab klasik tersebut justru menjadikan dinamika intelektual pesantren sangat aktif. Hal ini antara lain dilakukan pesantren dalam kegiatan *Bahtsul Masail*, *syawir*, dan kegiatan diskusi lainnya. Namun secara internal, sudah diberikan beberapa epilog atau pengantar diskusi melalui *syarah* yang ditulis sebagai bentuk komentar atau penjelasan dari isi kitab (*matan*). Atau dinamika tersebut juga dimulai oleh kiainya langsung. Seperti yang dilakukan oleh KH. Hasyim Asy'ari pada tahun 1920 an, ia membuka sekolah yang diistilahkan Madrasah Salafiyyah, yang diarahkan kepada para santri Tebuireng pada waktu itu, dengan memberikan metode pengajaran baru. Di Madrasah Salafiyyah ini, para santri diajarkan mata pelajaran non-Islam-Belanda, Sejarah, Ilmu Bumi, dan Matematika, di samping kitab kuning yang diajarkan Pesantren, (Burhanuddin, 2017:446-447), (Yunus, 1979:235-236), (Dhofier, 1982:104).

Pendirian Madrasah di lingkungan pesantren ini ternyata merupakan inisiasi yang sangat tepat untuk menjawab tantangan era itu. Paling tidak mencakup beberapa hal yang menjadi latar belakang munculnya terobosan hadirnya lembaga pendidikan yang terbaru ini. Di antaranya, memberikan wawasan kepada para santri agar melek dengan perkembangan zaman yang tidak hanya bisa dilihat dari bacaan kitab kuning. Sehingga *output*-nya jelas, seperti yang dilakukan Tebuireng tidak hanya menghasilkan ulama saja. Melainkan ulama sekaligus intelektual (ulama yang faham dengan permasalahan sekuler) dan intelektual sekaligus ulama (sarjana yang faham dengan permasalahan agama), (Burhanuddin, 2017: 447).

Posisinya untuk mendulang kemandirian bangsa, otoritas ulama akhir-akhir ini juga semakin dipertimbangkan kembali dalam arena pergulatan politik negara, untuk menyuarakan ide-ide kritis yang membangun. Ini sangat berbeda semenjak Ordebaru berkuasa, suara-suara kritis di media massa, publikasi buku, ruang teater dan pentas musik serta ruang parlemen dibungkam demi terjaganya stabilitas politik rezim, (Irawanto, 1999:93). Ini juga termasuk faktor yang sangat berpengaruh atas munculnya ideologi keagamaan yang beragam hingga berafiliasi pada paham radikal ektrimis. Seperti yang dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan orientasi khilafah islamiyah-nya.

Dari riset yang ada, Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Jawa Tengah mampu mencegah radikalisme melalui penguatan kurikulum Aswaja Annahdliyah. Hasil riset ini, dari 3000 lebih satuan pendidikan di bawah LP Ma'arif NU Jawa Tengah sampai 2019 tidak ada yang terpapar radikalisme (Ibda, 2019:109). Meski banyak organisasi radikal seperti HTI menyusup di sekolah atau madrasah.

Dalam lingkup keagamaan, Ormas Islam (HTI dkk) tersebut memiliki prinsip reformis secara hukum syari'ah, yaitu dengan kembali pada Al-Qur'an dan Hadis. Menghendaki semua lini yang ada dalam kehidupan bermasyarakat harus berbasis pada syari'ah yang dianggap sebagai legalitas tertinggi tanpa bisa diganggu gugat sedikitpun. Uniknya, sekaligus sangat mengerikan, cenderung menyalahkan yang tidak seideologi dengan mereka.

Di sini, posisi penguatan Kitab Kuning untuk menjawab problema tersebut sangat dibutuhkan. Sebagai basis pendidikan ciri khas ke-NU an yang dari dulu telah terbina dengan baik. Bukan justru ikut tergerus dengan arus kemoderen-an dengan dalih reformasi di era teknologi 4.0, yang menawarkan sistem komunikasi dengan sangat canggih. Namun jika tidak diiringi dengan penguatan basis keilmuan dan diiringi dengan nilai-nilai spiritual, maka akan meninggalkan keresahan tersendiri, (Mahfudz, 2011:83).

Adapun tahfiz Al-Qur'an, sebenarnya bagi lembaga pendidikan Madrasah maupun Ma'arif NU, bukanlah suatu tren yang baru. Namun, bagi lembaga lain yang serupa justru menjadi wajah baru yang sangat diminati oleh masyarakat urban. Dengan segala kelebihan dan corak karakternya, eksistensi masyarakat urban mampu mendominasi arus perubahan,

termasuk gejala paham keagamaan. Ini mirip dengan istilah *society* yang berarti gaya hidup masyarakat elit yang menduduki kelas tinggi dalam masyarakat dan cenderung mendominasi. Contohnya, di negeri-negeri Barat pada umumnya, orang-orang kaya sangat menentukan corak hidup untuk ditiru, (Shadely, 1993:63).

Kasus tersebut bisa dijadikan alat untuk membaca tren pendidikan Islam di kota-kota besar yang menggaungkan kurikulum Tahfiz Al-Qur'an dengan segala bentuk gaya marketingnya bisa diminiati oleh masyarakat kota menengah keatas, yang menurut tinjauan teori di atas, mereka cenderung sangat mendominasi diikuti. Dengan sendirinya, lembaga tersebut tentu tidak akan lepas dari pengaruh ideologinya yang mungkin berseberangan dengan NU maupun falsafah negara.

Demikian itu yang dikhawatirkan bisa terjadi di sekolah-sekolah Islam Terpadu yang sekarang semakin bermunculan di mana-mana. Sekolah Islam Terpadu (SIT) sendiri pada mulanya didirikan oleh para aktivis Islam yang dulu bergabung dengan LDK (Lembaga Dakwah Kampus) kelompok tarbiyah dari berbagai perguruan tinggi top di Indonesia. Hadirnya mereka diklaim karena prihatin dengan kondisi pendidikan Indonesia, sehingga menggait para pemuda untuk menjadi agen islamisasi yang bisa memasuki segala lini (Qadir, 2009:104-107).

Dengan keyakinan bahwa pengaruh dakwah akan lebih maksimal jika dilakukan melalui pendidikan, akhirnya mereka mendirikan Sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri dari tingkat TK sampai SMA, dan sekolah ini yang menginspirasi Sekolah Islam Terpadu di seluruh Indonesia. Hingga saat ini, sudah ada sekitar 1.000 sekolah Islam Terpadu yang tergabung dalam Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) di seluruh Indonesia, dan ada sekitar 10.000 SIT yang tidak tergabung dalam JSIT, (Suyatno, 2013:357). Data yang ditemukan Usamah Hisyam, ada 1.926 SIT yang masuk dalam JSIT (Hisyam, 2012:68). Para pendiri ini, sekarang yang tergabung dalam politik praktis PKS, di antaranya Tifatul Sembiring.

Pertanyaannya, mungkinkah dinamika berpikir lembaga tersebut tidak mengikuti dinamika berpikirnya PKS? Sampai disini penulis cukup kuat beralasan jika ramainya demo di Monas yang terjadi beberapa kali dipelopori oleh segelintir orang kaya yang terjaring dalam lembaga SIT. Dengan segala alasan untuk mencari naungan tempat berhijrah serta mengantarkan anaknya menjadi generasi *Qur'ani* dan *rabbani* (dua istilah tersebut menjadi target utama yang ditawarkan oleh lembaga SIT).

Dengan bekal tren itulah, orang yang tertarik menyekolahkan anaknya di SIT berharap besar, anaknya dapat tumbuh menjadi generasi yang memiliki paham agama yang baik, hafal Al-Qur'an dan terjauh dari dekadensi moral, yang cenderung terjadi di kalangan sekolah-sekolah umum maupun sekolah berkualitas rendah, tidak menampik di dalamnya terdapat Madrasah. Penentuan kualitas tinggi yang ditawarkan SIT juga merupakan *take and give* dengan bandrol harga yang sangat tinggi. Berdasarkan pengamatan penulis, SIT yang ada di Jakarta dan sekitarnya standar biaya masuknya rata-rata 35 jt-an, dan biaya SPP rata-rata 2 jutaan perbulan.

Jika dilihat dari rincian biaya dan hasil yang ditawarkan sehingga bisa menarik peminat dari kalangan menengah ke atas, maka upaya yang sama cukup mudah dilakukan oleh Madrasah dan LP Ma'arif NU. Justru dengan kurikulum yang selama ini dirawat dengan baik di Pesantren, Madrasah dan LP Ma'arif NU jika dikembangkan dengan seksama diiringi strategi marketing yang baik akan cukup mumpuni menjadi pesaing adanya sekolah-sekolah Islam Terpadu yang sudah ada sampai saat ini.

Meskipun terlihat ada paradigma pragmatis, namun dalam konteks tertentu bisa jadi lebih relevan. Sebagai penyeimbang sekaligus memenuhi permintaan masyarakat perkotaan. Tidak pula menafikan perkotaan secara geografis, tetapi juga "perkotaan" pola pikir yang sekarang semakin merambah hingga ke daerah-daerah. Sehingga untuk menjawab kebutuhan

pendidikan abad 21 ini, pendidikan agama memiliki peran besar untuk mengimbangi kemajuan zaman. Di mana orang sudah tidak lagi membicarakan atau merisaukan hal-hal yang bersifat permulaan dan masih mentah. Kerena didominasi dengan kecenderungan serba praktis, oleh teknologi yang semakin canggih. Di sela-sela ini, juga bisa menopang berhasilnya segala produk dengan mudah dikenal oleh masyarakat secara luas. Termasuk produk pendidikan.

Madrasah dan LP Ma'arif NU dalam Tantangan

Madrasah dan LP Ma'arif NU yang tampil sebagai Lembaga Pendidikan Islam berperan aktif serta memiliki hak otoritatif berbicara tentang Pendidikan Agama Islam yang setara bahkan lebih tinggi dibanding lembaga lain yang serupa. Inti dari representasi Madrasah dan LP Ma'arif NU merupakan lembaga pendidikan yang tidak lepas dari pengajaran dalam bidang akidah, syariah dan akhlak. Ketiga ajaran inti Islam yaitu aqidah, syariah dan akhlak menjadi dasar adanya ruang lingkup Pendidikan Agama Islam (PAI) itu sendiri. Ruang lingkup mata pelajaran PAI meliputi keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah (*hablun minallah*), hubungan manusia dengan sesama manusia (*hablun min an-nas*), hubungan manusia dengan dirinya sendiri (*hablun an-nas binafsih*), hubungan manusia dengan makhluk lain dan lingkungannya (Langgulung, 1987:25).

Dualisme yang berkaitan antara agama Islam dan pendidikan sebagai ujung tombak majunya suatu bangsa dan semakin tingginya suatu agama jika pemeluknya memiliki bekal ilmu yang luas. Peran ilmu dalam agama di antaranya sebagai penopang terbentuknya akhlak yang baik, mengendalikan diri seseorang untuk menuju jalan yang lurus (*shirat al-mustaqim*). Serta ilmu juga dapat membantu untuk mencari tujuan yang dicari, menjadikan yang jauh semakin dekat, menyinari pandangan, sedangkan orang yang berilmu dapat memberikan kebahagiaan kepada orang lain, pendapat serta ide-ide briliannya mampu memberikan kontribusi untuk orang lain, (Al-Abrasyi, 1964:280).

Sama jika dikaitkan dengan undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 Bab I pasal I, yang mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta ketrampilan yang dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa pendidikan Islam adalah penataan individu dan sosial yang dapat menyebabkan seseorang tunduk ta'at pada Islam dan menerapkannya secara sempurna di dalam kehidupan individu dan masyarakat. Semakin lengkap jika ditambahkan dengan definisi sebagai usaha mengubah tingkah laku individu dilandasi oleh nilai-nilai islami dalam kehidupan pribadi atau kehidupan kemasyarakatan (Tohirin, 2005:9).

Dengan adanya Pendidikan Agama Islam juga diharapkan mampu mengantarkan seseorang dapat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang telah diyakini secara menyeluruh, serta menjadikan ajaran Islam sebagai suatu pandangan hidupnya demi keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia maupun di akhirat yang dapat diraih dengan pendampingan dan asuhan (Darajat, 1996:25).

Jika demikian, pendidikan dalam perspektif Islam berupaya mengembangkan seluruh potensi peserta didik seoptimal mungkin, baik yang menyangkut aspek jasmaniah maupun rohaniah, akal dan akhlak. Dengan optimalisasi seluruh potensi yang dimilikinya, pendidikan Islam berupaya mengantarkan peserta didik ke arah kedewasaan pribadi secara paripurna yaitu yang beriman dan berilmu pengetahuan. Pada konteks ini, ciri-ciri utama Madrasah sangat perlu dikembangkan serta memiliki peranan penting dalam rangka mengendalikan Pendidikan Agama Islam.

Paling tidak memiliki tujuan sementara yang harus dicapai oleh umat Islam yang melaksanakan pendidikan Islam. Tujuan sementara disini yaitu tercapainya berbagai kemampuan seperti kecakapan jasmaniah. Pengetahuan membaca, pengetahuan menulis, ilmu-ilmu kemasyarakatan, kesusilaan, keagamaan, kedewasaan, jasmani dan rohani, dan sebagainya. Serta memiliki tujuan akhir pendidikan Islam yaitu terwujudnya kepribadian yang seluruh aspek-aspek merealisasikan atau mencerminkan ajaran Islam (Uhbiyati, 1996:30).

Pendidikan agama Islam di sekolah/madrasah bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang berkembang dalam keimanan, ketakwaan, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Namun tetap tidak kalah uniknya, madrasah maupun sekolah yang berada dalam lingkungan pesantren memiliki tradisi khas sebagai hasil dari perkembangan pengalaman sosial lingkungannya (Irawan, 2018:16). Semakin matang ditopang dengan subkultur yang dimilikinya. Di antaranya meliputi: kepemimpinan pesantren yang mandiri, kitab-kitab klasik yang menjadi rujukan, dan sistem nilai yang digunakan di pesantren (Wahid, 2001:32).

Oleh karena itu berbicara pendidikan agama Islam, baik makna maupun tujuannya tetap mengacu pada penanaman nilai-nilai Islam dan tidak dibenarkan melupakan etika sosial atau moralitas sosial. Penanaman nilai-nilai ini juga dalam rangka menuai keberhasilan hidup (*hasanah*) di dunia bagi anak didik yang kemudian akan mampu membuahkan kebaikan (*hasanah*) di akhirat kelak. Prinsip ini sudah paten, tidak memilah pendidikan Islam yang diselenggarakan oleh lembaga manapun. Terlebih bagi Madrasah, Pesantren maupun LP Ma'arif NU sebagai pelopor berdirinya lembaga pendidikan agama Islam.

Tantangan berikutnya, mampukah lembaga pendidikan agama Islam tetap menjadi pelopor tanpa adanya dikotomi pendidikan? Persoalan ini penting untuk dijawab dengan jelas untuk menunjukkan bahwa produk Madrasah maupun LP Ma'arif NU mampu melahirkan generasi-generasi modern yang siap melayani permintaan masyarakat kekinian, tanpa mereduksi kualitas sebagai alumni pesantren.

Walaupun sejarah telah membuktikan alumni pesantren yang hanya memiliki kapasitas keilmuan dalam bidang agama juga mampu melukiskan perjuangan bangsa sampai meraih kemerdekaan. Wacana seperti ini memang tidak ada salahnya. Namun bisa dibuktikan bahwa pendidikan prosentasi besarnya hanya berpengaruh mengantarkan pada wilayah linieritas. Adapun yang lintas batas, sebagaimana yang dipelopori KH. Asy'ari, Wahid Hasyim dan Abdurrahman Wahid tentu lahir sebagai orang di lain kebiasaan para santri pada umumnya. Sehingga wajar saja, walaupun produk pesantren tetapi memiliki pemikiran yang sangat dinamis.

Bukti tersebut juga sekaligus menampik anomali penjajah ketika itu yang memandang sebelah mata adanya pendidikan Agama Islam yang diselenggarakan di tempat-tempat pengajian. Sehingga pemerintahan Belanda melalui Gubernur Jenderal Van Den Capellen pada tahun 1819 M mengambil inisiatif merencanakan berdirinya sekolah dasar bagi pribumi agar dapat membantu pemerintahan Belanda. Surat edaran kepada para bupati disebutkan bahwa dianggap penting untuk secepat mungkin mengadakan peraturan pemerintah yang menjamin meratanya kemampuan membaca dan menulis bagi penduduk pribumi agar mereka lebih mudah untuk dapat menaati undang-undang dan hukum negara. Sebab bagi pihak Belanda, pendidikan Islam yang ada di pondok pesantren, masjid, musalla dan lain sebagainya dianggap tidak membantu pemerintah Belanda karena para santri pondok dianggap buta huruf Latin, (Zuhairini, 2000:148).

Fenomena itu bisa saja terjadi, seperti halnya santri pesantren yang tidak menguasai bahasa internasional bahasa Inggris, serta tidak menguasai IT dengan apik. Sehingga

terbelakang dalam persaingan intelektual yang justru diambil alih orang santri modern atau non santri yang pada akhirnya melakukan hegemoni ke agamaan di dalam kecanggihan teknologi. Di sini muncul fenomena agama digital, yang mempelajari agama di dunia digital yang bisa diakses kapan saja dan dimana saja selama masih memiliki kecepatan internet.

Sehingga digital berubah menjadi dunia baru yang merupakan transformasi masyarakat modern dari dunia nyata ke dunia nyata untuk belajar agama. Akibatnya terjadi pergeseran otoritas keagamaan, dari teks tradisional menuju popularitas relasional, (Jannah, 2018:137). Di era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini, perilaku yang dipraktikkan masyarakat dalam dunia nyata maupun dunia nyata sebenarnya saling berkait. Bahkan tidak ada batas maupun tedeng aling-aling antara ranah privat dan publik, serta membaurnya nilai-nilai sakral dengan sesuatu yang profan. Hal ini misalnya bisa diidentifikasi adanya internet yang digunakan sebagai media yang menampilkan nilai-nilai religiusitas dan spiritualitas penggunaannya, (Jannah, 2018:138).

Di sini juga ketika sumber digital semakin ramai maka akan terjadi matinya kepakaran yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat. Pasalnya, pernyataan ilmiah yang disertai argumen dengan beragam referensi akan menjadi patah seketika, hanya dengan hujatan *haters* di media sosial. Anehnya, para penghujat tersebut hanya bermodal pengalaman belajar via youtube maupun media internet lainnya.

Tugas besar dari Madrasah dan LP Ma'arif NU sudah saatnya merevitalisasi pengajaran agama yang harusnya mendapat tempat yang teratur, saksama, hingga cukup mendapat perhatian yang semestinya, dengan tanpa mengurangi kualitas pendidikan yang sudah terawat dari dulu. Sesuai dengan relevansi pendidikan modern saat ini, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Kemudian juga, UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab II pasal 4 dikemukakan: Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Madrasah dan LP Ma'arif NU masih menjaga dengan baik apa yang dibicarakan sebagai konsep pendidikan Islam, yang mencakup kehidupan manusia seutuhnya, tidak hanya memperhatikan dan mementingkan segi aqidah (keyakinan), ibadah (ritual), dan akhlak (norma-etika) saja, tetapi jauh lebih luas dan dalam dari semua itu. Dan sudah pasti, pendidikannya harus memiliki wawasan luas dalam bidang keagamaan, Aqidah dan amaliah, Akhlaq dan budi pekerti, Fisik-biologi, eksak, mental-psikis, dan kesehatan. Dengan modal tersebut, akan tercipta suatu pendidikan yang tidak hanya tergerus para arus modern, dan juga tidak terkungkung dalam paradigma tradisional. Sehingga yang diharapkan akan lahir pertemuan antara pengalaman tradisional dengan perkembangan modern.

Wacana dalam *Fikrah Nahdliyah*

Permasalahan yang menjadi bahasan di atas sangat menarik jika dibaca dengan wawasan *fikrah nahdliyah*, yang secara definisi merupakan kerangka berpikir yang didasarkan pada ajaran *Ahlussunnah wal Jama'ah* yang dijadikan sebagai landasan berpikir Nahdlatul Ulama (*Khitthah Nahdliyah*) untuk menentukan arah perjuangan sebagai ujung tombak perbaikan umat (*islah al-Ummat*). Di dalamnya terdapat metode berpikir yang

disyaratkan, di antaranya meliputi: Akidah (harus mengikuti *manhaj* dan pemikiran Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi), dalam bidang Fikih (harus bermazhab secara qauli maupun manhaji kepada salah satu empat mazhab), dalam bidang tasawuf mengikuti imam Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali, (PWNU Jatim, 2013:169).

Karakter Aswaja Annahdliyah sudah jelas dan dapat dimasukkan ke dalam ranah wacana *fikrah nahdliyah*. Pertama, *at-tawassuth*, yaitu sikap tengah-tengah, sedang-sedang, tidak ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Kedua, *at-tawazun*, seimbang dalam berbagai hal, termasuk dalam penggunaan dadil *aqli* (bersumber dari akal pikira/rasionalitas) maupun *naqli* (bersumber dari Alquran dan sunnah). Ketiga, *at-tasamuh*, yaitu toleransi, menghargai perbedaan, serta menghormati orang yang memiliki prinsip hidup yang kebetulan tidak sama. Keempat, *i'tidal*, yaitu sikap tegak lurus, tidak condong ke kanan atau ke kiri, atau berlaku adil dan tidak berpihak kecuali pada yang benar. Kelima, *amar makruf nahi munkar*, yaitu mengajak pada kebaikan, dan mencegah pada keburukan. Keenam, *maslahah mursalah*, yaitu dalam mengambil hukum/kebijakan harus mengedepankan kepeninganan publik. Sementara *ukhuwah nahdliyah* itu sendiri terbagi atas ukhuwah Islamiyah (persaudaraan umat Islam), *ukhuwah wathaniyah* (persaudaraan bangsa/kebangsaan), dan *ukhuwah basyariyah/insaniyah* (persaudaraan umat manusia) (Irawan; Ibda; Niam; Munif, 2019: 5-6).

Bahan ajar di Madrasah maupun di LP Ma'arif NU tidak bisa lepas dari semua unsur tersebut. Ketiga ajaran inti Islam yaitu aqidah, syariah dan akhlak menjadi dasar adanya ruang lingkup pendidikan agama islam. Aqidah menurut istilah ialah keyakinan hidup atau lebih khas lagi iman. Sesuai dengan maknanya ini yang disebut aqidah ialah bidang keimanan dalam islam dengan meliputi semua hal yang harus diyakini oleh seorang muslim/mukmin. Terutama sekali yang termasuk bidang aqidah ialah rukun iman yang enam, yaitu iman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat-Nya, kepada kitab-kitab-Nya, kepada Rasul-rasul-Nya, kepada hari Akhir dan kepada qada'dan qadar. Dan dalam hal ini sudah bulan mengikuti golongan Ahlussunnah Waljama'ah yang sudah dibuktikan secara fakta ilmiah dan sejarah, (PWNU Jatim, 2013:170).

Kemudian dalam hal Fikih yang mengatur tentang *munakahat* (perkawinan), termasuk di dalamnya soal harta waris (faraidh) dan wasiat, *Tijarah* (hukum niaga) termasuk di dalamnya soal sewa-menyewa, utang-piutang, wakaf, Hudud dan jinayat, mengikuti empat mazhab yang populer, yaitu Abu Hanifah, Imam Malik, As-Syafii, dan Hambali. Meskipun demikian, juga dianjurkan untuk melakukan mazhab secara metodologis (*manhaji*) selain juga melakukan pengembangan secara *qauli*. Jelasnya, secara *qauli*, pengembangan Fikih bisa dilakukan dengan melakukan kontekstualisasi kitab kuning atau melalui pengembangan contoh-contoh aplikasi kaidah *ushul Fiqih* maupun *Qawaid al-Fiqhiyyah*. Sedangkan secara *manhaji*, pengembangan Fikih bisa dilakukan dengan cara pengembangan teori dinamisasi *ilat* agar Fikih yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan umat, (Mahfudz, 2011:xxvii).

Proyek tersebut juga sesuai dengan yang dilakukan para ulama reformis, khususnya di NU, dan semakin menguatkan bahwa pintu ijtihad tidak pernah tutup. Langkah ini muncul sering berbenturan dengan kelompok puritan yang meyakini atas penutupan pintu ijtihad, yang justru menjadi faktor stagnasi pemikiran hukum Islam di Indonesia, sebagai penyimpangan dari ajaran yang benar. Sebagaimana terjadi perdebatan para pejuang *manhaji* dengan ulama tradisional yang tetap teguh memegang status quo dalam hukum Islam. Namun, selama ini sikap NU yang hanya memegang pada satu mazhab saja sama halnya memandangi dunia ini tidak ada perubahan (*viewed the world as unchanging*).

Tidak menampik bahwa ulama-ulama NU yang melakukan trans pemikiran dengan menggunakan "Pintu Ijtihad masih terbuka" ketika mengadopsi dari empat mazhab secara *manhaji*, justru mendapat tantangan internal. Kiai Sahal Mahfudz sendiri pernah mengkritik bahwa Fiqih (baca: kitab kuning) bagi sebagian kaum muslimin diperlakukan sebagai norma

dogmatis yang tidak bisa diganggu gugat, bahkan posisinya dianggap sebagai kitab suci setelah Al-Qur'an, (Mahfudz, 2011:24).

Sehingga yang dibutuhkan adalah kontekstualisasi Fiqih, dengan tidak meninggalkan Fiqih secara mutlak. Justru dengan melakukan kontekstualisasi, segala aspek kehidupan akan terjiwai oleh Fiqih secara konseptual dan tidak menyimpang dari rel Fiqih itu sendiri. Atau akibatnya, minimal akan menimbulkan kitab kuning dapat digemari oleh para santri untuk melakukan kajian lebih dalam.

Dalam konteks yang sama, Abdurrahman Wahid juga pernah memberikan gagasan dinamisasi kemudian dilanjutkan dengan pribumisasi hukum Islam. Tawaran tersebut berupaya menggabungkan antara akulturasi, resistensi, negoisasi, revitalisasi dan nativasi, sebagai upaya solutif relevansi hukum yang tepat untuk masyarakat Indonesia. Gerakan yang serupa dengan dua tokoh di atas sebenarnya sudah ada disuarakan pada era awal abad 20. Di antaranya Hasbi Ash Siddiqiey, yang menggagas Fikih keindonesiaan. Pemikiran tersebut muncul karena melihat hukum Islam di Indonesia sangat kental dikelilingi keterbelakangan dalam berpikir. Lebih tersudut ke dalam aspek ibadah, dan bercorak satu mazhab saja. Memperkeras taklid, melarang talfik dan melarang keras pintu ijtihad terbuka (Wahyudi, 2014:28).

Modal besar yang dimiliki NU dan menjadi mandat penyelenggara pendidikan di lembaga Madrasah maupun LP Ma'arif NU untuk meneruskan ciri-ciri khas *Fikrah Nahdliyah*. Meliputi: pola pikir yang moderat, senantiasa berpikir *tawazun* (seimbang) dalam menyikapi berbagai persoalan sehingga tidak melenceng ke kanan maupun ke kiri.

Kemudian pola pikir yang toleran, artinya dapat hidup berdampingan dengan pihak lain walaupun akidah, cara berpikir dan budayanya berbeda. Selanjutnya dilengkapi dengan pola pikir reformatif, yang senantiasa mengupayakan perbaikan menuju ke arah yang lebih baik. Serta melakukan kontekstualisasi, dinamisasi untuk menjawab kebutuhan umat, dan juga melakukan pola pikir metodologis sebagaimana yang menjadi ide besar Nahdlatul Ulama.

C.PENUTUP

Selama ini, Madrasah dan LP Ma'arif NU memiliki rekam sejarah yang menunjukkan kualitas akademik yang sangat besar. Namun perlu dikembangkan dengan mengikuti tantangan zaman, tanpa mengurangi kualitas wawasan pendidikan tradisional yang diterapkan di Madrasah dan pesantren. Ini akan menjadi ciri khas tersendiri. Yaitu kuat dalam kitab kuning dan Tahfiz Al-Qur'an juga perlu "ditonjolkan." Tantangan selanjutnya untuk tidak ikut pada arus global yang mendikotomi antara pendidikan agama dan umum. Serta berani untuk ikut berkontestasi dengan lembaga pendidikan lain yang mengimitasi pola Madrasah, namun eskistensinya sangat mengancam NU bahkan falsafah negara.

DAFTAR SUMBER

- Athiyah al-Abrasyi, Muhammad. 1964. *rûh al-Islâm*, Mesir: Maktabah al-Anjlu al-Misriyyah.
- Burhanuddin, Jajat. 2017. *Islam dalam Arus Sejarah Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Darajat, Zakiyah. 1996. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dhofier, Zamakhsyari. 1982. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*, Jakarta: LP3S.
- Ibda, Hamidulloh. The Strategy of the Educational Institution Ma'arif Nahdlatul Ulama of Central Java In Preventing Radicalism. *Borneo International Journal of Islamic Studies*, Vol.1(2), May 2019.
- Irawanto, Budi. 1999. *Film, Ideologi, dan Militer: Hegemoni Militer dalam Sinema Indonesia*, Yogyakarta: Media Pressindo.
- Irawan, Aguk. 2018. *Akar Sejarah Etika Pesantren di Nusantara dari Era Sriwijaya sampai Tebu Ireng dan Ploso*, Tangerang Selatan: Pustaka IIMan.
- Irawan, R. Andi; Ibda, Hamidulloh; Niam, Khoirun; Munif, Junaidi Abdul. 2019. *Modul dan Panduan Teknis Gerakan Literasi Ma'arif (GLM)*. Semarang: CV. Asna Pustaka.
- Karel. A. Steenbrink 1986. *Pesantren, Madrasah, Sekolah*, Jakarta: LP3ES.
- Langgulong, Hasan. 1987. *Asas-asas Pendidikan Islam.*, Jakarta: Pustaka al-Husna.
- Mahfudz, Sahal. 1999. *Pesantren Mencari Makna*, Jakarta: Pustaka Ciganjur.
- , *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LKis, 2011, cetakan ke 8.
- Munir, Ghazali. 2008. *Warisan Intelektual Jawa Dalam Pemikiran Kalam Muhammad Shalih as-Samarani*. Semarang: Wali Songo Press.
- Qadir, Zuhli. 2009. *Gerakan Sosial Islam: Manifesto Kaum Beriman*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Shadely, Hasan. 1993. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Rieneka Cipta.
- Suyatno, 2013. "Sekolah Islam Terpadu: Filsafat, Ideologi, dan Tren Baru Sekolah Islam Indonesia," dalam *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume II, Nomor 2, Desember.
- TIM Aswaja NU Center PWNNU Jatim. 2013. *Risalah Ahlussunnah wal Jama'ah: Dari Pembiasaan Menuju Pemahaman dan Pembelaan Akidah-Amaliah NU*, Surabaya: Khalista
- Tohirin, 2005. *Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Uhbiyati, Nur. *Ilmu Pendidikan Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Van Bruinessen, Martin. 2015. *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*, Yogyakarta: Gading Publishing.
- Wahid, Abdurrahman. 2001. *Menggerakkan Tradisi, Esai-esai Pesantren*, Yogyakarta: LKis.
- Wahyudi, Yundian. 2014. *Ushul Fikih Versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*, Yogya: Pesantren Nawesea Press.
- Yunus, Mahmud. 1979. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Mutiara.
- Zuhairini. 2000. *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000.